

**PENGARUH PDRB, PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA TERHADAP
KETIMPANGAN PENDAPATAN KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI
BENGKULU TAHUN 2015-2022**

SKRIPSI



Oleh

EMA MAHDALENA WATI

1910011111013

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Guna Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE)

Jurusan Ekonomi Pembangunan

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITA BUNGHATTA**

2023

HALAMAN PENGESAHAN

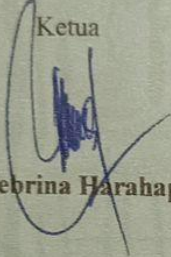
PENGARUH PDRB, PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA TERHADAP
KETIMPANGAN PENDAPATAN KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI
BENGKULU TAHUN 2015-2022

Oleh

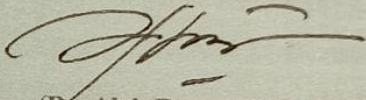
Emma Mahdalena Wati
1910011111013

Tim Penguji

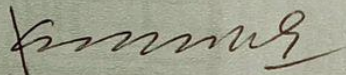
Ketua


(Dr. Erni Febrina Harahap, S.E., M.Si)

Sekretaris



(Dr. Alvis Rozani, S.E., M.Si)

Anggota


(Kasman Karimi, S.E., M.Si)

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar
sarjana Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
pada tanggal 10 Agustus 2023

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Bung Hatta


(Dr. Erni Febrina Harahap, S.E., M.Si)

JUDUL SKRIPSI

PENGARUH PDRB, PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA TERHADAP
KETIMPANGAN PENDAPATAN KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI
BENGKULU TAHUN 2015-2022

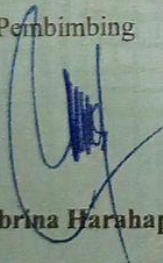
Oleh

Emma Mahdalena Wati
1910011111013

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 10 Agustus 2023

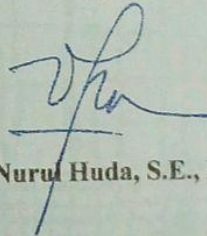
Menyetujui

Pembimbing



(Dr. Erni Febrina Harahap, S.E., M.Si)

Ketua Program Studi



(Nurul Huda, S.E., M.Si)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ema Mahdalena Wati

Npm : 1910011111013

Judul Skripsi : **PENGARUH PDRB, PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA
TERHADAP KETIMPANGAN PENDAPATAN
KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI BENGKULU TAHUN 2015-
2022**

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana di Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diajukan dalam naskah ini dan disebutkan dalam pustaka.

Padang, 23 Agustus 2023
Penulis

Ema Mahdalena Wati
Npm: 1910011111013

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Wr.Wb

Alhamdulillahirrahbilalamin, Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah dan karunianya, serta kemampuan berfikir, kejernihan hati dan ilmu pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang merupakan salah satu persyaratan guna meraih gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bung Hatta yang berjudul " **PENGARUH PDRB, PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA TERHADAP KETIMPANGAN PENDAPATAN KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI BENGKULU TAHUN 2015-2022**".

Penulis menyadari bahwa selama penulisan skripsi ini banyak mendapat bimbingan, dukungan, dan motivasi dari berbagai pihak, sehingga dalam kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan karunianya, yang telah memberikan mukjizat serta kekuatan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi. Dan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Tafdil Husni, S.E, MBA. Selaku Rektor Universitas Bung Hatta.
2. Ibu Dr. Erni Febrina Harahap, S.E.,M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bung Hatta.
3. Ibu Dr. Erni Febrina Harahap, S.E.,M.Si selaku Dosen Pembimbing yang penuh dengan kesabaran dalam meluangkan waktu, tenaga dan pikiran serta memberikan masukan yang bermanfaat dalam pembuatan skripsi ini, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan
4. Bapak Nurul Huda, S.E., M.Si dan Kasaman Karimi, S.E., M.Si selaku dosen penguji.
5. Ibu Nurul Huda, S.E.,M.Si selaku ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bung Hatta.

6. Dosen-dosen Jurusan Ekonomi Pembangunan dan dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah memberikan ilmu yang nantinya akan menjadi bekal ilmu di masa yang akan datang.
7. Kedua orang tua tercinta yang telah selalu memberikan kasih sayang, doa, nasehat, serta atas kesabarannya yang luar biasa dalam setiap Langkah hidup saya, serta dukungan dalam pembuatan skripsi saya, sehingga saya lebih semangat untuk menyelesaikan skripsi ini dengan tuntas. Beserta adik- adikku serta tercinta yang telah memberikan doa, semangat, bantuan baik moril dan materil yang tidak ternilai harganya.
8. Sahabat seperjuangan ku Susi dan Shella yang telah mensupport saya dalam penyusunan skripsi dan yang telah menemani proses skripsi dan masa-masa awal perkuliahan baik suka maupun duka yang telah berjuang bersama hingga sekarang.
9. Terakhir, terimakasih untuk diri sendiri karena telah mampu berusaha keras, berjuang, dan bertahan sejauh ini sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna dan banyak kekurangannya, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik dari pembaca untuk penulisan skripsi ini menjadi lebih baik di kemudian hari.

Padang, 23 Agustus 2023
Penulis

Ema Mahdalena Wati
Npm: 1910011111013

ABSTRAK

Ketimpangan pendapatan adalah perbedaan pendapatan relatif warga negara berpendapatan tinggi dan berpendapatan rendah. Ketimpangan pendapatan dapat dilihat dari angka Indeks Gini. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis pengaruh PDRB, dana Pendidikan dan Tenaga Kerja terhadap ketimpangan pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu tahun 2015-2022. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa data time series dan data cross section yang bersumber dari Badan Pusat Statistik. Penelitian ini memakai regresi data panel, dengan metode pendekatan Fixed Effect Model (FEM). Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa variabel PDRB dan Pendidikan berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan, sedangkan variabel Tenaga Kerja tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan.

Kata Kunci: Ketimpangan Pendapatan, PDRB, Pendidikan, Tenaga Kerja.

Abstract

Income inequality is the difference in the relative income of citizens of high and low income countries. Income inequality can be seen from the Gini Index. The purpose of this study is to analyze the effect of GRDP, Education Funds and Manpower on district/city income inequality in Bengkulu Province in 2015-2022. This study uses secondary data in the form of time series data and cross section data sourced from the Central Bureau of Statistics. This study uses panel data regression, with the Fixed Effect Model (FEM) approach. Based on the results of the analysis it is known that the GRDP and Education variables have a negative effect on income inequality, while the Labor variable has no effect on income inequality.

Keywords: *Income Inequality, GRDP, Education, Lab*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	14
1.3 Tujuan Penelitian	15
1.4 Manfaat Penelitian	16
BAB II KAJIAN PUSTAKA	17
2.1 Landasan Teori.....	17
2.1.1 Ketimpangan Pendapatan	17
2.1.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).....	22
2.1.3 Pendidikan	25
2.1.4 Tenaga Kerja.....	28
2.2 Hubungan Antar Variabel	30
2.2.1 Hubungan PDRB Dengan Ketimpangan Pendapatan	30
2.2.2 Hubungan Pendidikan Dengan Ketimpangan Pendaptan	33
2.2.3 Hubungan Tenaga Kerja Dengan Ketimpangan Pendapata.....	35
2.3 Penelitian Terdahulu	36
2.4 Mapping	47

2.5 Hipotesis Penelitian	60
2.6 Kerangka Pemikiran Konseptual	62
BAB III METODE PENELITIAN	63
3.1 Jenis Penelitian.....	63
3.2 Data Dan Sumber Data	63
3.3 Definisi Operasional Variabel.....	64
3.4 Uji Asumsi Klasik.....	65
3.5 Pemilihan Model.....	67
3.6 Estimasi Regresi Data Panel	69
3.7 Model Analisis	70
3.8 Pengujian Hipotesis	71
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	76
4.1 Deskripsi Data.....	76
4.1.1 Ketimpangan Pendapatan	76
4.1.2 Produk Domestik Regional Bruto.....	78
4.1.3 Pendidikan	80
4.1.4 Tenaga Kerja.....	81
4.2 Analisis Data.....	82
4.3 Uji Asumsi Klasik.....	83
4.4 Hasil Uji Pemilihan Data Panel	84
4.5 Hasil Estimasi Regresi Data Panel.....	88
4.6 Uji Hipotesis	92
4.7 Pembahasan.....	94
4.7.1 Pengaruh PDRB Terhadap Ketimpangan Pendapatan.....	94
4.7.2 Pengaruh Pendidikan Terhadap Ketimpangan Pendapatan	95

4.7.3 Pengaruh Tenaga Kerja Terhadap Ketimpangan Pendapatan.....	96
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	98
5.1 kesimpulan	98
5.2 Saran	98
DAFTAR PUSTAKA.....	100
LAMPIRAN.....	105

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Indeks Gini Di Pulau Sumatra Tahun 2015-2022	4
Tabel 1.2 Indeks Gini Kabupaten/Kota Di Provinsi Bengkulu Tahun 2015-2022	5
Tabel 1.3 PDRB Kabupaten/Kota (Miliar Rupiah) Atas Dasar Harga Konstan (2010) Tahun 2015-2022	7
Tabel 1.4 Penduduk Pengangguran Menurut Tingkat Pendidikan (Ribu Jiwa) Di Provinsi Bengkulu	10
Tabel 1.5 Perkembangan Jumlah Tenaga Kerja Di Provinsi Bengkulu Tahun 2015-2022	13
Tabel 2.1 Ukuran Nilai Indeks Gini.....	21
Tabel 2.3 Mapping	47
Tabel 4.1 Ketimpangan Pendapatan Kabupaten/Kota Di Provinsi Bengkulu Tahun 2015-2022	77
Tabel 4.2 PDRB Kabupaten/Kota Perkapita (Miliar Rupiah) Atas Dasar Harga Konstan [2010] Tahun 2015-2022 Di Provinsi Bengkulu.....	79
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Berpendidikan (Jiwa) Kabupaten/Kota Di Provinsi Bengkulu Tahun 2015-2022.....	80
Tabel 4.4 Persentase Jumlah Tenaga Kerja Kabupaten/Kota Di Provinsi Bengkulu Tahun 2015-2022	82
Tabel 4.5 Hasil Uji Normalitas	83
Tabel 4.6 Hasil Uji Multikolonieritas	83
Tabel 4.7 Hasil Uji Heteroskedastisitas	84
Tabel 4.8 Uji Chow.....	85

Tabel 4.9 Uji Hausmen	86
Tabel 4.10 Uji Lagrange Multiplier	87
Tabel 4.11 Common Effect Model	88
Tabel 4.12 Random Effect Model.....	89
Tabel 4.13 Fixed Effect Model	90
Tabel 4.14 Hasil Uji t.....	92
Tabel 4.13 Hasil Uji Goodness Of Fit	93

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Jumlah Penduduk Menurut Jenjang Pendidikan Di Provinsi Bengkulu	11
Gambar 2.1 Kurva Lorenz	18
Gambar 2.2 Kurva Kuznet	31
Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran Konseptual	60

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ketimpangan pendapatan terjadi karena adanya perbedaan antara kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi dengan kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah. Ketimpangan pendapatan yang terjadi pada negara berkembang umumnya muncul karena adanya proses pembangunan yang sedang berlangsung. Pembangunan merupakan suatu proses multidimensional yang menyangkut perubahan-perubahan besar pada struktur sosial, perilaku sosial, dan institusi sosial termasuk percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketimpangan pendapatan dan pemberantasan kemiskinan. Menurut Smith dan Todaro (2012), ketimpangan pendapatan adalah terdapatnya perbedaan yang diterima atau dihasilkan oleh masyarakat sehingga mengakibatkan tidak meratanya distribusi pendapatan nasional diantara masyarakat.

Adanya ketimpangan pendapat yang besar antar wilayah membawa dampak negatif dari segi ekonomi, sosial dan politik. Dari segi ekonomi menurut Sjafrizal (2014) menyebabkan kurang efesiennya penggunaan sumber daya yang tersedia dan mendorong terjadinya ketidakmerataan dalam pendapatan. Ketidakmerataan dalam pendapatan ini yang disebut dengan Ketimpangan Pendapatan.

Ketimpangan pendapatan tidak saja disebabkan oleh ketimpangan dalam distribusi pendapatan, tetapi secara kultural terjadi karena perbedaan suku atau rasisme. Beberapa studi di Amerika menunjukkan bahwa ketimpangan ekonomi, secara subjektif terkait dengan perbedaan rasisme yang terjadi antar kelompok masyarakat satu dengan yang lain. Oleh karena itu kebijakan pemerintah dalam

menanggulangi permasalahan ketimpangan ekonomi tidak hanya terfokus pada aspek distribusi pendapatan saja, akan tetapi menyangkut upaya reduksi ketimpangan yang terkait dengan masalah rasisme-sosial (Kraus et al., 2019). Diperkuat oleh Schmalor & Heine (2021) bahwa ketimpangan ekonomi dapat dikonstruksikan bukan saja sebagai ketimpangan obyektif (diukur melalui pendekatan pendapatan atau kesejahteraan masyarakat) tetapi juga dapat dikonstruksikan sebagai ketimpangan subyektif (diukur melalui pendekatan psikologis, sosio-demografis, dan budaya), di mana antara negara satu dengan negara lain memiliki perbedaan persepsi dan sudut pandang.

Bengkulu sebagai salah satu provinsi yang ada di pulau sumatera juga tidak terlepas dari masalah ketimpangan pendapatan pada pembangunan ekonominya. Provinsi Bengkulu yang terdiri dari 10 kabupaten/kota ini tentu saja memiliki berbagai persoalan yang harus diselesaikan, seperti masalah kesenjangan distribusi pendapatan. Aspek pemerataan pendapatan merupakan hal yang sangat penting untuk dipantau, karena pemerataan hasil pembangunan merupakan tujuan pembangunan nasional di Indonesia. Dengan demikian dalam praktiknya, untuk menghilangkan dan menekan nilai ketimpangan pembangunan ke arah pemerataan yang berlangsung di Provinsi Bengkulu yaitu dengan memaksimalkan proses pembangunan dan memaksimalkan sektor ekonomi yang memiliki keunggulan kompetitif disetiap daerah untuk dikembangkan.

Ketimpangan pendapatan yang terjadi di masing-masing daerah akan menimbulkan adanya kecemburuan sosial di masyarakat, antar masyarakat yang berpenghasilan rendah dengan yang berpenghasilan tinggi. Kecemburuan sosial yang muncul kemudian akan memperkeruh suasana karena dianggap kurang adil

jika disuatu daerah yang sama ada yang memiliki pendapatan yang sangat jauh perbedaannya meskipun hal ini terlihat dalam sila kelima yaitu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, dengan masih adanya ketimpangan di Indonesia, pada kenyataannya masyarakat belum sepenuhnya mencapai sila kelima tersebut. Masalah ketimpangan pendapatan ini telah lama menjadi persoalan dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi yang dilaksanakan oleh sejumlah negara miskin dan berkembang (Arsyad, 2010).

Pengukuran ketimpangan ekonomi, secara kuantitatif dapat dilakukan melalui beberapa metode, salahsatunya melalui metode Indeks Gini. Hartmann et al. (2017) menjelaskan bahwa Indeks Gini dapat menjelaskan kondisi perekonomian suatu negara (diukur dari perkembangan tingkat ketimpangan ekonominya). Semakin tinggi rata-rata dari Indeks Gini suatu negara, maka ketimpangan ekonomi yang terjadi di negara yang bersangkutan semakin tinggi, artinya distribusi pendapatan di negara tersebut semakin tidak merata. Ketimpangan ekonomi (pendapatan) mempunyai hubungan yang erat dengan pertumbuhan ekonomi. Semakin timpang kondisi ekonomi (pendapatan) suatu negara, maka akan berakibat terhadap pertumbuhan ekonomi yang semakin terhambat. Hal ini disebabkan adanya ketimpangan dalam kesempatan (dalam konteks hubungan antar generasi menunjukkan adanya kesenjangan antara satu generasi dengan generasi yang lain) (Aiyar & Ebeke, 2019). Arranz (2020) menjelaskan bahwa Indeks Gini merupakan ukuran yang digunakan untuk mengidentifikasi tingkat kesenjangan atau tingkat ketimpangan dalam bidang ekonomi (economic inequality) dan dalam bidang sosial (social inequality). Tabel 1.1 akan memperlihatkan bagaimana kondisi ketimpangan dalam

distribusi pendapatan diseluruh provinsi yang ada di Pulau Sumatera. Dimana ketidakmerataan ketimpangan pendapatan tersebut diukur dengan Indeks Gini.

Tabel 1. 1
Indeks Gini di Pulau Sumatera Tahun 2015-2022

No	Provinsi	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-Rata
1	Aceh	0,339	0,341	0,329	0,318	0,321	0,319	0,323	0,291	0,322
2	Sumatera Utara	0,326	0,312	0,335	0,311	0,315	0,314	0,313	0,326	0,319
3	Sumatera Barat	0,319	0,312	0,312	0,305	0,307	0,301	0,300	0,292	0,306
4	Riau	0,366	0,347	0,325	0,347	0,331	0,321	0,327	0,323	0,335
5	Jambi	0,344	0,346	0,334	0,335	0,324	0,316	0,315	0,335	0,331
6	Sumatera Selatan	0,334	0,362	0,365	0,341	0,339	0,338	0,340	0,330	0,343
7	Bengkulu	0,371	0,354	0,349	0,355	0,329	0,323	0,321	0,315	0,339
8	Lampung	0,352	0,358	0,333	0,326	0,331	0,32	0,314	0,313	0,330
9	Kep. Bangka Belitung	0,275	0,288	0,276	0,272	0,262	0,257	0,347	0,255	0,279
10	Kep. Riau	0,339	0,352	0,359	0,339	0,337	0,334	0,339	0,325	0,340

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia

Berdasarkan data BPS (2022), Terlihat pada Tabel bahwa Indeks Gini dengan laju pertumbuhan pendapatan per kapita Indonesia menurut harga kostan 2010 selama periode Tahun 2015-2022 cenderung berfluktuasi dimana pada Provinsi Bengkulu pada Tahun 2015 sebesar 0,371 pada Tahun 2016 turun menjadi 0,354, Tahun 2017 kembali menurun menjadi 0,349 tetapi pada Tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 0,355 pada Tahun 2019 turun kembali menjadi 0,329 dan pada Tahun 2020 hingga 2022 mengalami penurunan mejadi 0,315 dengan rata-rata 0,339 menempati posisi ketiga Indeks Gini tertinggi di Pulau Sumatera.

Tabel menunjukkan Indeks Gini di Pulau Sumatera, dimana Indeks Gini menggambarkan ketimpangan pendapatan atau pengeluaran disuatu wilayah, indeks ini berkisar pada nilai 0 hingga 1. Artinya, bila mendekati angka 0 berarti tidak ada sama sekali ketimpangan atau merata, dan sebaliknya dikatakan ketimpangan sempurna atau tidak merata bila nilai indeks mendekati angka 1,

maka ketimpangan pendapatan yang terjadi di daerah tersebut tergolong sangat tinggi (Todaro dan Smith, 2011:254).

Tabel 1.2
Indeks Gini Kabupaten/Kota Di Provinsi Bengkulu tahun 2015-2022

No	Kabupaten/Kota	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-rata
1.	Bengkulu Selatan	0,39	0,34	0,37	0,36	0,32	0,31	0,30	0,30	0,33
2.	Rejang Lebong	0,33	0,36	0,32	0,33	0,30	0,29	0,36	0,30	0,32
3.	Bengkulu Utara	0,35	0,31	0,31	0,35	0,30	0,28	0,31	0,28	0,31
4.	Kaur	0,38	0,33	0,32	0,31	0,29	0,32	0,28	0,28	0,31
5.	Seluma	0,35	0,32	0,33	0,31	0,30	0,29	0,25	0,29	0,30
6.	Mukomuko	0,32	0,30	0,31	0,32	0,29	0,25	0,26	0,26	0,28
7.	Lebong	0,32	0,27	0,30	0,29	0,31	0,28	0,27	0,27	0,28
8.	Kepahiang	0,34	0,30	0,33	0,30	0,27	0,31	0,28	0,30	0,30
9.	Bengkulu Tengah	0,37	0,30	0,28	0,29	0,26	0,26	0,25	0,24	0,28
10.	Kota Bengkulu	0,40	0,37	0,37	0,39	0,36	0,37	0,38	0,37	0,37

*Sumber:*Badan Pusat Statistik Bengkulu

Pada Tabel 1.2 menunjukkan Indeks Gini di Provinsi Bengkulu menurut Kabupaten/Kota pada Tahun 2015-2022 juga cenderung berfluktuasi, pada Tahun 2015 angka tertinggi yaitu 0,40 di Kota Bengkulu disusul oleh Bengkulu Selatan dengan Indeks Gini 0,39, sedangkan posisi terendah yaitu Mukomuko dan Lebong yaitu dengan Indeks Gini 0,32. Pada Tahun 2016 Kota Bengkulu masih memegang angka tertinggi dari sembilan Kabupaten/Kota lainnya yaitu 0,37 menurun dari tahun sebelumnya, sedangkan di urutan kedua yaitu Rejang Lebong dengan Indeks Gini 0,36, sedangkan posisi terendah yaitu Lebong dengan Indeks Gini 0,27. Pada Tahun 2017 Kota Bengkulu dan Bengkulu Selatan memiliki angka Indeks Gini tertinggi yaitu 0,37, sedangkan angka Indeks Gini terendah yaitu pada Bengkulu Tengah dengan Indeks Gini 0,28. Pada Tahun 2018 Kota Bengkulu kembali mengalami kenaikan Indeks Gini yaitu 0,39, dan disusul oleh Bengkulu Selatan dengan Indeks Gini 0,36, sedangkan di posisi terendah yaitu Lebong dan Bengkulu Tengah dengan Indeks Gini 0,29. Pada Tahun 2019 Kota Bengkulu masih

memegang angka Indeks Gini tertinggi namun mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu 0,36, disusul oleh Bengkulu Selatan dengan Indeks Gini 0,32 dan pada posisi Indeks Gini terendah yaitu pada Bengkulu Tengah dengan angka 0,26. Pada Tahun 2020 Indeks Gini tertinggi masih dipimpin oleh Kota Bengkulu dengan angka 0,37, di posisi kedua yaitu Kaur dengan Indeks Gini 0,32 dan di posisi terendah yaitu Mukomuko dengan Indeks Gini 0,25. Pada Tahun 2021 Indeks Gini tertinggi masih dipimpin oleh Kota Bengkulu dengan angka 0,38, dan di posisi kedua yaitu Rejang Lebong dengan Indeks Gini 0,36, dan yang terendah adalah Bengkulu Tengah dengan Indeks Gini 0,25. Pada Tahun 2022 Kota Bengkulu masih memiliki Indeks Gini tertinggi yaitu dengan angka 0,37 dan yang terendah yaitu Bengkulu Tengah dengan angka 0,24.

Menurut Sukirno (2016), PDRB adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah atau provinsi. Pengertian nilai tambah bruto adalah nilai tambah produksi (output) dikurangi dengan biaya antara. Komponen-komponen nilai tambah bruto mencakup komponen-komponen faktor pendapatan (upah dan gaji, bunga, sewa tanah dan keuntungan), penyusutan dan pajak tidak langsung neto. Jadi dengan menghitung nilai tambah bruto dari masing-masing sektor dan kemudian menjumlahkannya akan menghasilkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Produk Domestik Regional Bruto merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir

yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. Sementara itu, PDRB konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga. PDRB juga dapat digunakan untuk mengetahui perubahan harga dengan menghitung deflator PDRB (perubahan indeks implisit). Indeks harga implisit merupakan rasio antara PDRB menurut harga berlaku dan PDRB menurut harga konstan.

Tabel 1.3
PDRB Kabupaten/Kota Perkapita (Miliar Rupiah) Atas Dasar Harga Konstan [2010] tahun 2015-2022 di Provinsi Bengkulu

No	Kabupaten	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	rata-rata
1	Bengkulu Selatan	2.971.	3.127.	3.281.	3.444.0	3.615.0	3.624.5	3.682.8	3.860.2	3.024.67
		301,76	256,41	689,64	32,00	34,00	89,00	60,00	11,00	3,00
2	Rejang Lebong	4.999.	5.259.	5.518.	5.791.9	6.078.9	6.083.0	6.316.9	6.367.7	5.085.30
		817,1	987,93	000,53	52,00	49,00	34,00	70,00	29,00	1,00
3	Bengkulu Utara	4.299.	4.514.	4.732.	4.960.3	5.204.5	5.216.3	5.279.2	5.047.1	4.906.70
		370,57	179,52	510,42	03,00	93,00	53,00	06,00	01,00	2,00
4	Kaur	1.855.	1.953.	2.051.	2.153.4	2.260.7	2.263.5	3.268.2	2.280.6	2.260.88
		582,01	631,17	246,78	86,00	93,00	49,00	10,00	16,00	9,00
5	Seluma	2.372.	2.490.	2.610.	2.735.8	2.870.6	2.870.3	4.367.9	4.703.2	3.127.67
		163,63	698,9	517,22	43,00	68,00	25,00	03,00	60,00	2,00
6	Mukomuko	2.713.	2.865.	3.014.	3.166.0	3.325.2	3.326.0	5.464.2	5.056.0	3.616.49
		893,99	597,09	864,35	13,00	58,00	56,00	31,00	82,00	9,00
7	Lebong	1.745.	1.835.	1.927.	2.023.9	2.124.5	2.126.7	3.169.4	2.051.3	2.125.58
		574,49	673,43	479,56	90,00	00,00	20,00	03,00	57,00	7,00
8	Kepahiang	2.292.	2.421.	2.545.	2.673.1	2.803.8	2.805.5	3.579.9	3.891.5	2.876.80
		650,21	726,94	972,99	49,00	65,00	56,00	23,00	60,00	0,00
9	Bengkulu Tengah	2.377.	2.496.	2.620.	2.750.4	2.887.0	2.885.3	4.624.8	3.087.3	2.966.19
		714,25	628,17	221,79	36,00	20,00	44,00	50,00	15,00	1,00
10	Kota Bengkulu	12.327	13.082	13.796	14.552.	15.339.	15.301.	15.961.	20.657.	15.127.3
		.029,4	.472,5	.914,8	353,00	352,00	488,00	630,00	432,00	34,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Bengkulu

Berdasarkan Tabel 1.3 dapat dilihat secara keseluruhan bahwa perbandingan nilai PDRB pada tiap Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Bengkulu cukup besar dan berfluktuasi setiap tahunnya. Dilihat dari PDRB antar daerah di Provinsi Bengkulu tersebut bahwa nilai PDRB terendah berada di Kabupaten Lebong yaitu dengan rata-rata 2.125.587,00 Miliar Rupiah dan kemudian disusul oleh Kaur yaitu 2.260.889,00 Miliar Rupiah. Sedangkan, PDRB dengan nilai tertinggi berada di Kota Bengkulu yaitu dengan rata-rata 15.127.334,00 Miliar Rupiah.

PDRB tidak serta merta mampu menggambarkan kesejahteraan yang nyata pada tiap penduduk di dalamnya. Sehingga, untuk mengukurnya dapat dengan menggunakan PDRB per kapita daerah. Dimana, semakin besar PDRB per kapitanya maka semakin baik tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Begitupun sebaliknya apabila PDRB semakin kecil maka bisa diartikan semakin buruk tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Kuznet menyatakan bahwa mula-mula pertumbuhan ekonomi pada tahap awal akan mengalami kenaikan disertai dengan ketimpangan distribusi pendapatan yang tinggi pula sampai pada titik tertentu, kemudian pada tahap selanjutnya ketimpangan distribusi pendapatan akan mulai mengalami pemerataan. Teori ini kemudian dikenal sebagai Kurva Kuznet “U Terbalik” karena terdapat perubahan dalam distribusi pendapatan selama kurun waktu tertentu (Todaro & Smith 2009).

Faktor lainnya yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan adalah pendidikan. Pengaruh pendidikan terhadap ketimpangan pendapatan telah banyak dianalisis dalam literatur ekonomi tenaga kerja. Analisis tersebut terkait dengan pengembalian (pay-off) biaya sekolah yang telah dikeluarkan dengan pendapatan yang diterima. Dalam hal ini, pendidikan yang dicapai seseorang bisa menentukan

pendapatan yang diterimanya. Oleh karena itu, studi mengenai pendidikan dan pendapatan merupakan informasi penting bagi pengambil kebijakan, baik pemerintah maupun swasta, untuk menentukan berapa banyak investasi yang diperlukan pada sektor ini (Card, 2016).

Salah satu isu terkait pengaruh pendidikan terhadap pendapatan adalah ketimpangan pendapatan. Pada awal 1980-an, ketimpangan pendapatan di negara-negara Barat mengalami peningkatan karena pengaruh globalisasi. Para pembuat kebijakan berpendapat bahwa sekolah merupakan alat terbaik untuk mengurangi ketimpangan pendapatan. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Ashenfelter dan Rouse (2011). Mereka menyatakan bahwa sekolah adalah tempat yang menjanjikan untuk meningkatkan skill dan pendapatan individu. Oleh karena itu, kebijakan terkait pendidikan memiliki potensi untuk mengurangi atau meningkatkan ketimpangan pendapatan.

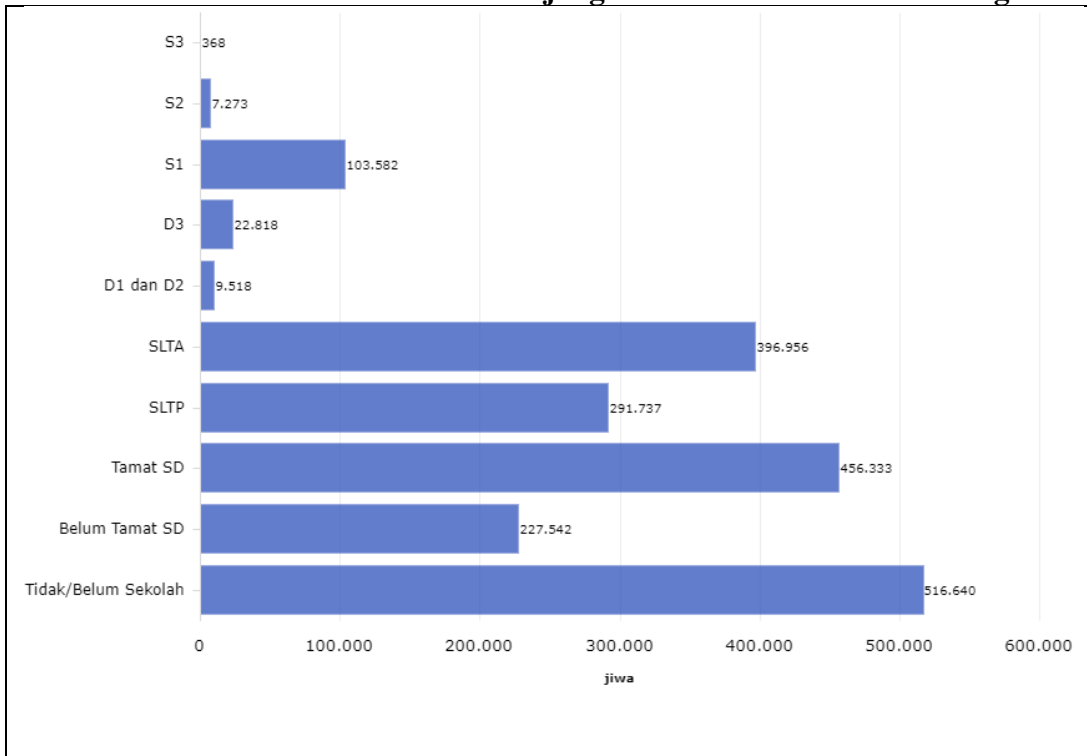
Martins dan Pereira (2014) melakukan penelitian di 16 negara pada pertengahan 1990-an dan menemukan bahwa pengaruh pendidikan terhadap pendapatan pada tenaga kerja laki-laki berbeda menurut distribusi pendapatan yang diterima. Selain itu, penelitian tersebut juga membuktikan bahwa pendidikan berdampak positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan dalam level (within-levels wage inequality). Ini kemungkinan terjadi karena pengaruh over-education, interaksi pendidikan dan kemampuan, kualitas sekolah atau perbedaan disiplin ilmu di 16 negara tersebut. Sullivan dan Smeeding (2014) juga menyatakan bahwa perbedaan ketimpangan pendapatan di negara-negara maju lebih banyak dipengaruhi oleh tingkat pendidikan tenaga kerja

Pendidikan merupakan faktor penting dalam investasi sumber daya manusia. Pendidikan juga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan serta menurunkan ketimpangan pendapatan terutama pada sektor tenaga kerja. Ketimpangan pendapatan terjadi karena adanya over-education, interaksi antara kemampuan dan pendidikan, serta perbedaan kualitas sekolah atau jurusan (bidang studi) antar wilayah. Jika analisis dilakukan menurut gender, ternyata pengaruh pendidikan terhadap pendapatan laki-laki lebih rendah dibandingkan perempuan. Pendidikan bisa mengurangi ketimpangan pendapatan antar gender. Oleh karena itu, pemerintah bisa meningkatkan investasi dibidang pendidikan untuk mengurangi ketimpangan pendapatan, termasuk ketimpangan pendapatan antar gender

Tingkat pendidikan masyarakat di Provinsi Bengkulu masih tergolong rendah yang hanya 8,84 tahun setara sekolah dasar (SD). Kondisi demikian akan memengaruhi indek pembangunan manusia (IPM).

Hal tersebut diketahui berdasarkan data rilis Badan Pusat Statistik (BPS) 2020 yang menyebutkan, rata-rata lama sekolah di Bengkulu hanya 8,84 tahun. Tertinggi di Kota Bengkulu yang mencapai 11,79 tahun setara SMP, dan terendah di Kabupaten Bengkulu Tengah yang hanya 7,47 tahun.

Gambar 1.1
Jumlah Penduduk Menurut Jenjang Pendidikan Di Provinsi Bengkulu



Sumber:Badan Pusat Statistik Bengkulu

Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri mencatat, jumlah penduduk Bengkulu sebanyak 2,03 juta jiwa pada Juni 2021. Dari jumlah tersebut, ada 143,56 ribu jiwa (7,06%) penduduk di provinsi tersebut yang berpendidikan hingga jenjang perguruan tinggi.

Rinciannya, sebanyak 368 jiwa (0,02%) penduduk Bengkulu yang merupakan lulusan S3. Ada pula 7,27 ribu jiwa (0,36%) penduduk di provinsi tersebut yang berpendidikan S2, serta ada 103,58 ribu jiwa (5,1%) yang berpendidikan S1.

Kemudian, ada 22,82 ribu jiwa (1,12%) penduduk Bengkulu yang berpendidikan D3 dan ada 9,52 ribu jiwa (0,47%) yang berpendidikan D1 dan D2.

Penduduk Bengkulu yang berpendidikan hingga Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) sebanyak 396,96 ribu jiwa (19,53%) dan ada 291,74 ribu jiwa (14,35%) penduduk yang berpendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP).

Berikutnya, sebanyak 456,33 ribu jiwa (22,45%) penduduk Bengkulu yang telah menamatkan pendidikan hingga jenjang Sekolah Dasar (SD) dan terdapat 227,54 ribu jiwa (11,19%) penduduk Bengkulu yang belum tamat SD. Sementara yang tidak/belum sekolah ada 516,64 ribu jiwa (25,42%).

Ketidakcocokan pendidikan dan kemampuan mengakibatkan tenaga kerja memiliki tingkat pendidikan yang terlalu tinggi (*over-education*) atau terlalu rendah (*under-education*) dari apa yang dibutuhkan oleh pekerjaan tertentu. Sebagai contoh, seorang sarjana bekerja sebagai pegawai tata usaha, yaitu jabatan non-manual yang membutuhkan kemampuan atau keterampilan rendah, dianggap pendidikannya terlalu tinggi. Sedangkan seorang lulusan SMA bekerja sebagai insinyur, yaitu jabatan non-manual yang membutuhkan kemampuan atau keterampilan tinggi, dianggap memiliki pendidikan yang rendah.

Selain itu juga yang tidak dapat dipisahkan dari permasalahan ketimpangan pendapatan adalah masalah tenaga kerja. Tenaga kerja adalah setiap orang laki - laki maupun wanita yang sedang dalam atau akan melakukan pekerjaan, baik luar maupun dalam hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dengan kata lain orang dalam usia kerja dianggap mampu bekerja.

Lewis mengemukakan teorinya mengenai tenaga kerjan, yaitu, kelebihan pekerja merupakan kesempatan dan bukan masalah. Kelebihan pekerja satu sektor

akan memberikan andil terhadap pertumbuhan output dan penyediaan pekerja di sektor lain. Selanjutnya Lewis mengemukakan bahwa ada dua sektor di dalam perekonomian negara sedang berkembang, yaitu sektor modern dan sektor tradisional. Sektor tradisional tidak hanya berupa sektor pertanian di pedesaan, melainkan juga termasuk sektor informal di perkotaan (pedagang kaki lima, pengecer, pedagang angkringan). Sektor informal mampu menyerap kelebihan tenaga kerja yang ada selama berlangsungnya proses industrialisasi, sehingga disebut katub pengaman ketenagakerjaan. Dengan terserapnya kelebihan tenaga kerja disektor industri (sektor modern) oleh sektor informal, maka pada suatu saat tingkat upah di pedesaan akan meningkat. Peningkatan upah ini akan mengurangi perbedaan tingkat pendapatan antara pedesaan dan perkotaan, sehingga kelebihan penawaran pekerja tidak menimbulkan masalah pada pertumbuhan ekonomi.

Dan menurut Hamzah (2014), tenaga kerja adalah tenaga yang bekerja didalam maupun luar hubungan kerja dengan alat produksi utama dalam proses produksi baik fisik maupun pikiran. tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan.

Tabel 1.5
Perkembangan Jumlah Tenaga Kerja Di Provinsi Bengkulu
Tahun 2015-2022

Tenaga Kerja	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	rata-rata
Penduduk Usia Kerja (000 jiwa)	1.345,75	1.372,78	1.398,54	1.454,7	1.477,99	1.499,57	1.520,43	1.526,13	1.449,486
Angkatan Kerja (000 Jiwa)	951,01	997,91	969,25	1022,15	1035,95	1075,68	1.060,52	1.098,67	1.026,39
Bekerja (000 Jiwa)	904,32	964,97	932,98	987,91	1.002,16	1.031,88	1.021,78	1.069,99	989,49
Penganggur (000 Jiwa)	46,69	32,94	36,28	34,24	33,79	43,8	38,75	40,61	38,38
TPAK (%)	70,67	72,69	69,3	70,27	70,09	71,73	69,75	70,59	70,63
TPT (%)	4,91	3,33	3,74	3,35	3,26	4,07	3,65	4,32	3,825

Sumber: Badan Pusat Statistik Bengkulu

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Tahun 2015 hingga 2022 pada Tabel 1.5 dapat diketahui jumlah Penduduk yang Memasuki Usia Kerja memiliki rata-rata 1449,48 ribu jiwa, Angkatan Kerja dengan rata-rata 1026,39 ribu jiwa, yang Bekerja dengan rata-rata sebanyak 989,49 ribu jiwa, Pengangguran dengan rata-rata 38,38 ribu jiwa, TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja) dengan rata-rata 70,636%, dan TPT (Tingkat Pengangguranterbuka) memiliki rata rata 3,82%.

Mengatasi masalah yang timbul akibat belum meratanya pembangunan dikarenakan juga terdapat beberapa daerah yang lain mengalami pertumbuhan ekonomi yang lambat. Daerah tersebut tidak mengalami perkembangan dan kemajuan yang sama, ini disebabkan oleh kurangnya sumberdaya yang dimiliki. Kemudian dengan rendahnya tingkat pendidikan yang tidak merata di beberapa daerah menyebabkan perbedaan jumlah tenaga kerja yang berbeda antar daerah sehingga menyebabkan ketimpangan dan perbedaan pendapatan antar daerah tersebut. Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis mengangkat topik dalam penelitian ini dengan judul “Pengaruh PDRB, Pendidikan dan Tenaga Kerja Terhadap Ketimpangan Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2015-2022”.

1.2 Rumusan Masalah

Pertumbuhan ekonomi yang cepat di suatu daerah dapat mengakibatkan ketimpangan pula di daerah tersebut. Dilihat dari nilai Indeks Gini Ratio yang berdasarkan data yang diperoleh dari BPS provinsi Provinsi Bengkulu dalam waktu enam tahun terakhir dengan nilai rata-rata sebesar 0,339. Hal ini berarti bahwa tingkat ketimpangan antar kabupaten/kota di Bengkulu masih cukup tinggi dan distribusi pendapatan yang belum merata. Pertumbuhan ekonomi diikuti dengan ketimpangan pendapatan antar wilayah merupakan permasalahan dalam pembangunan, sehingga diperlukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan. Berdasarkan gambaran tersebut, maka permasalahan yang akan dilihat dalam penelitian ini dirumuskan dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengaruh PDRB Terhadap Ketimpangan Pendapatan Kabupaten/Kota Di Provinsi Bengkulu Pada Tahun 2015-2022?
2. Bagaimana Pengaruh Pendidikan Terhadap Ketimpangan Pendapatan Kabupaten/Kota Di Provinsi Bengkulu Pada Tahun 2015-2022?
3. Bagaimana Pengaruh Tenaga Kerja Terhadap Ketimpangan Pendapatan Kabupaten/Kota Di Provinsi Bengkulu Pada Tahun 2015-2022?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan-rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk Menganalisis Pengaruh PDRB Terhadap Ketimpangan Pendapatan Kabupaten/Kota Di Provinsi Bengkulu Tahun 2015-2022.

2. Untuk Menganalisis Pengaruh Pendidikan Terhadap Ketimpangan Pendapatan Kabupaten/Kota Di Provinsi Bengkulu Tahun 2015-2022.
3. Untuk Menganalisis Pengaruh Tenaga Kerja Terhadap Ketimpangan Pendapatan Kabupaten/Kota Di Provinsi Bengkulu Tahun 2015-2022.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah

Bagi pemerintah kabupaten/kota provinsi Bengkulu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan informasi kepada pemerintah sebagai pembuat kebijakan ekonomi dalam mengambil keputusan. Pemerintah mendapatkan informasi yang memadai dalam rangka untuk mengurangi serta mendorong peningkatan pemerataan distribusi pendapatan.

2. Bagi Peneliti

Bagi peneliti sendiri, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ekonomi tentang Pengaruh PDRB, Pendidikan Dan Tenaga Kerja Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Kabupaten/Kota Provinsi Bengkulu Pada Tahun 2015-2022.